

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditiya, N. Y., & Dirgantari, N. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2013-2015. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 15(1)
- Alfi MR, Sari VF. Pengaruh Leverage, Jumlah Penduduk dan Umur Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Empiris pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Periode 2016-2020. *J Eksplor Akunt.* 2023;5(3):1098–114.
- Andirfa, M., Basri, H., & Majid, M. S. A. (2016). Pengaruh belanja modal, dana perimbangan dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan kabupaten dan kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 5(3).
- Annisa, W. H. (2019). *Pengaruh dana alokasi khusus (DAK), dana alokasi umum (DAU), pendapatan asli daerah (PAD), sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA), luas wilayah dan kinerja keuangan terhadap belanja modal (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah)* (Doctoral dissertation, Universitas Widya Dharma).
- Antari dan Sedana (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manaj Univ Udayana*, 7(2),1080-1110.
- Aziz, A. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Di Jawa Timur). *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 86–101.

Darise, N. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta: PT Indeks

Dewata E, Ilmiyyah NM, Sarikadarwati S. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012-2015. J AKUNTANSI, Ekon dan Manaj BISNIS. 2017;5(1):147.

Djuniar L, Zuraida I. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Belanja Modal Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Balanc J Akunt dan Bisnis. 2018;3(2):445.

DJUNIAR, L., SUNARDI, S., SARI, D., & SATRIA, E. (2021). Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Dan Provinsi Lampung. *Accountia Journal (Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)*, 5(01), 50-61

Elmiza, E., & Arza, F. I. (2020). Pengaruh Faktor Finansial Dan Faktor Non Finansial Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(2), 2807-2825.

Fahmi, Irham. (2012). Analisis Kinerja Keuangan. Alfabeta. Bandung.

Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Pogram IBM SPSS. Edisi Sembilan. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Halaskova, M., & Halaskova, R. (2016). Assessment of financial capabilities of local governments in EU countries for the development of local public services. *Lex Localis*, 14(3), 379.

Halim Abdul (2001). Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Pertama, Yogyakarta: UPP AMP YKPN

Halim Abdul (2012), Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat: Jakarta.

Halim Abdul. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Jensen, Michael C dan Meckling. (1976). *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics*, 3(1), 305-360.

Kementrian Keuangan RI. *Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuang. 2017;20:20.

Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Diakses pada 10 Maret 2022.

Mardiasmo. 2009, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta.

Mardiasmo. 2017. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2017*. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Mulyani, S., & Wibowo, H. (2017). Pengaruh belanja modal, ukuran pemerintah daerah, intergovernmental revenue dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan (kabupaten/kota di provinsi jawa tengah, tahun 2012-2015). *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 15(1).

Nurul Sukma Handayani. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Kalimantan Timur*. 2019;1-12. Available from: <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/pengertian-keuangan-daerah-7229819c/detail/>

Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah*. Jakarta

*Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Peraturan perundang – undangan (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta

Peraturan perundang – undangan (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Peraturan perundang – undangan (UU) Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Pilcher, R. A. (2005). Local government financial key performance indicators-not so relevant, reliable and accountable. *International Journal of Productivity and Performance Management*, 54(56), 451-467

Prabawati PSS, Wany E. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Alokasi Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2015. *Equilib J*

Pratiwi T.Y (2018). Pengaruh Pad , Dana Perimbangan , Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Jawa Tengah 2012-2016 the Effect of Pad , Intergovernmental Revenue , Capital Expenditures Toward Financial Performance of Central Java Year 2012-2016. 2016;1–15.

Putra, S. A. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Lingkup Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2020. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 3(1), 1-13.

Putri, N. K. N. I., & Darmayanti, N. P. A. (2019). *Pengaruh Pad Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali* (Doctoral dissertation, Udayana University).

- Ratnasari, D., & Meirini, D. (2022). PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal, SILPA dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi Udayana*, 32(5), 1189-1199.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Rondonuwu, R. H., Tinangon, J. J., & Budiarmo, N. (2016). Analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(4).
- Rosemary., Chinyeaka Justine., dan Barisua Barry (2016). Local government financial autonomy: a comparative analysis of Nigeria and Brazil. *Arabian Journal of Business and Management Review (OMAN Chapter)*, 5(10), 38.
- Sari, N. M. D. P., & Mustanda, I. K. (2019). *Pengaruh ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah* (Doctoral dissertation, Udayana University).
- Sebastian and Cahyo, H. (2016). Analysis of Economic Performance as the Independence Indicators of Government in East Java Province. *Review of Integrative Business & Economics Research*, 5(2), 272–285.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sularso, H., & Restianto, Y. E. (2012). Pengaruh kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah. *Media Riset Akuntansi*, 1(2).

Sulistyo AT. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. *Indones Treas Rev J Perbendaharaan Keuang Negara dan Kebijakan Publik*. 2018;3(1):43–59.

Thalib, F. (2019). *Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten di Jawa Timur Periode 2013-2017* (Doctoral dissertation, STIE Perbanas Surabaya).

